

## Filosofi Pribumisasi Islam sebagai Respons terhadap Konteks Sosial Politik Kontemporer di Indonesia

Adrianus Fani<sup>1</sup>, Subaidi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia (email: frandylahurus4933@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia (email: subaidi@uin-suka.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 8 October 2025

Revised: 13 October 2025

Accepted: 20 November 2025

Available online: 29 November 2025

#### Kata Kunci:

Gus Dur; tradisi; budaya; Islam nusantara

#### Keywords:

Gus Dur; tradition; culture; Islam nusantara

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis filosofi pribumisasi Islam dalam sorotan cahaya pemikiran K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Di tengah meluasnya stigma negatif terhadap Islam pada umumnya dan dalam konteks kehidupan sosial politik kontemporer di Indonesia pada khususnya, yang acapkali terjebak dalam politik identitas dan tindakan intoleransi agama, gagasan Gus Dur tentang pribumisasi Islam berusaha menawarkan sudut pandang yang mendalam untuk kembali memahami Islam dalam konteks Indonesia. Artikel ini lebih menyoroti tentang bagaimana Gus Dur menawarkan kerangka analisis kritis untuk memahami

keseimbangan antara Islam, tradisi dan budaya khas Nusantara. Kontribusi khusus tulisan ini terletak pada penekanan bahwa Islam di Indonesia mesti bersifat kontekstual, sesuai dengan karakter budaya Nusantara yang menganut prinsip harmoni atau keselarasan, sehingga segala bentuk politik identitas dan sikap intoleransi agama yang acap kali terjadi dalam konteks kehidupan sosial politik di Indonesia perlu dievaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pribumisasi Islam menurut Gus Dur dapat menjadi jawaban atas tuduhan atau stigma negatif yang dilekatkan pada Islam, sekaligus merespon situasi sosial politik kontemporer di Indonesia yang acapkali diwarnai oleh politik identitas dan intoleransi agama, serta menunjukkan komitmen pada toleransi dan perdamaian yang menjadi basis kultural kehidupan masyarakat Islam Nusantara.

### ABSTRACT

*This article aims to critically analyse the philosophy of pribumisasi Islam via the lens of K. H. Abdurrahman Wahid's (Gus Dur) ideas. Amidst the widespread negative stigma against Islam in general and in the context of contemporary socio-political life in Indonesia in particular, which is often trapped in identity politics and religious intolerance, Gus Dur's idea of the pribumisasi Islam seeks to offer an in-depth perspective to re-understand Islam in the Indonesian context. This article highlights how Gus Dur offers a critical analytical framework for understanding the balance between Islam, tradition, and the unique culture of Indonesia. This article's distinctive contribution lies in its emphasis on the need to contextualise Islam in Indonesia in accordance with the archipelago's cultural character, which upholds the idea of harmony or balance. This is necessary in order to assess the various forms of identity politics and religious intolerance that frequently arise within the framework of Indonesian sociopolitical life. The study's findings indicate that Gus Dur's concept of pribumisasi Islam can serve as a response to the accusations or negative stigma associated with Islam. Additionally, it can address the current socio-political condition in Indonesia, which is frequently characterised by religious intolerance and identity politics. This commitment to tolerance and peace is a cultural foundation of the Islamic communities of Indonesia.*

## PENDAHULUAN

Di era modern, persepsi terhadap Islam telah mengalami tantangan yang signifikan, baik di tingkat domestik maupun global. Peristiwa-peristiwa tragis seperti intimidasi dan kekerasan yang mengatasnamakan Islam serta tindakan organisasi ekstremis lainnya telah memicu gelombang Islamofobia. Tragedi 11 September 2001 di Amerika Serikat menjadi salah satu titik puncak yang memperburuk persepsi negatif terhadap Islam. Munculnya berbagai gerakan Islam di Indonesia yang cukup menonjol seperti Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad (LJ), Jama'ah Ikhwan al-Muslimin Indonesia (JAMI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) pasca-jatuhnya Soeharto juga menarik untuk dicermati. Kelompok-kelompok ini menjadi sangat menonjol karena pemahaman keagamaan yang cenderung literal dan aksi-aksinya yang cenderung radikal (Azyumardi, 2004: 33). Pemberitaan yang berfokus pada aksi-aksi ekstremis itu memicu diskriminasi dan pandangan yang meluas bahwa Islam identik dengan kekerasan, sekaligus menciptakan tantangan besar bagi dakwah Islam di era digital. Selain itu, menurut Alif & Nur (2019: 57), beberapa tradisi dan budaya lokal di Jawa seperti *selamatan* (acara syukuran dengan mengundang beberapa kerabat atau tetangga) dan *nyadran* (ritual penghormatan kepada leluhur di makam) mulai dianggap sebagai praktik bidah. Padahal, Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamiin* (Musliq & Adnar, 2014: 3). Hal ini berarti bahwa eksistensi agama Islam dapat menghadirkan rahmat, berkah, cinta dan kebaikan bagi alam dan seisinya. Misi dan ajaran agama Islam tidak hanya ditujukan kepada satu kelompok tertentu, tetapi seluruh alam semesta.

Menghadapi aneka tantangan dan stigma negatif terhadap Islam yang begitu kompleks, gagasan dan filosofi Islam Nusantara tentang pribumisasi Islam menurut Gus Dur muncul sebagai sebuah narasi tandingan yang kuat. Jika membaca aneka kumpulan tulisan Gus Dur seperti *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, *Islam Kosmopolitan*, *Pribumisasi Islam*, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, *Pergulatan Agama*, *Negara dan Kebudayaan*, terdapat gambaran tentang bagaimana Gus Dur mencetuskan ide-ide yang sangat brilian dan dinamis terkait Islam itu sendiri. Sebagai seorang intelektual Muslim terkemuka dan mantan Presiden Republik Indonesia, Gus Dur mewarisi dan mengembangkan pemikiran progresif Islam yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, pluralisme, dan kearifan lokal. Seluruh karya hidupnya, termasuk konsep pribumisasi Islam, secara langsung menangani akar penyebab stigma negatif dan menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengembalikan wajah Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsep pribumisasi Islam dalam perspektif Gus Dur. Dengan membahas ulang konsep ini, penulis bermaksud untuk melihat manifestasi Islam yang berakulturasi dengan budaya, tradisi, dan kearifan lokal di wilayah Indonesia. Akulturasi dipahami sebagai sebuah proses sosial di mana unsur-unsur dalam Islam diterima dan diolah ke dalam kebudayaan lokal demi menciptakan identitas baru yang islami tanpa menghilangkan esensi budaya lokal itu sendiri. Penulis juga berpandangan bahwa konsep pribumisasi Islam dalam perspektif Gus Dur dapat dijadikan sebagai solusi atas persoalan intoleransi agama dan politik identitas yang acap kali terjadi dalam kehidupan sosial politik kontemporer di Indonesia, serta kecenderungan pelabelan atau stigma negatif lain yang dilekatkan pada Islam sebagai sebuah organisasi yang menganut paham ekstremisme dan

terorisme. Hal ini menjadi sebuah fenomena yang terus mencuat ke permukaan dalam pergulatan keislaman di tanah air Indonesia. Tulisan ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian yakni pendahuluan, historisitas gagasan Islam Nusantara, biografi singkat Gus Dur, gagasan Gus Dur tentang pribumisasi Islam, pro dan kontra pribumisasi Islam (Islam Nusantara), filosofi pribumisasi Islam sebagai respon terhadap realitas kehidupan sosial politik kontemporer di Indonesia, dan kesimpulan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model pendekatan analisis historis faktual terhadap tokoh Gus Dur. Objek material yang menjadi pokok perhatian penulis dalam penelitian ini adalah pandangan Gus Dur tentang pribumisasi Islam, sementara objek formal dari penelitian ini adalah analisis historis dan filosofis atas pemikiran Gus Dur tentang pribumisasi Islam sebagai hasil akulturasi antara Islam, tradisi dan budaya Nusantara, sekaligus respon terhadap stigma negatif yang dilekatkan pada Islam dalam pergulatan keislaman di Indonesia.

## HISTORISITAS GAGASAN ISLAM NUSANTARA

Sejak muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Jombang-Jawa Timur tanggal 1-5 Agustus 2015 (Qomar, 2015: 20), term Islam Nusantara menjadi *booming* hampir di seantero Indonesia, khususnya di kalangan kaum Islam. Islam Nusantara adalah istilah yang relatif baru namun mewakili model keislaman yang telah berakar dalam di Indonesia selama berabad-abad. Bila ditelisik lebih jauh, konsep ini bukan sebuah agama baru, melainkan sebuah manifestasi dari Islam yang berakulturasi dengan budaya, tradisi, dan kearifan lokal di wilayah kepulauan Indonesia.

Secara historis, Islam Nusantara menggambarkan proses penyebaran Islam yang damai dan persuasif, di mana ajaran-ajaran Islam menyatu secara serasi dengan tradisi lokal Nusantara yang tidak bertentangan dengan *akidah* (keyakinan). Pendekatan ini terlihat jelas dalam metode dakwah yang dilakukan oleh para *Wali Songo* (sembilan wali) di Jawa, yang menggunakan mekanisme budaya dan dialog untuk memperkenalkan Islam. Peran para Wali Songo sebagai *cultural-broker* (Geertz, 1960: 40) berhasil menggabungkan prinsip-prinsip syariah Islam dengan *tasawuf* (sufisme) dan tradisi budaya lokal dalam satu kesatuan, sehingga ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat. Pendekatan ini membedakan Islam Nusantara dari model Islam yang lebih puritan atau formalistik, yang cenderung menolak dan menghancurkan tradisi lokal.

Secara sosiologis, gagasan tentang Islam Nusantara lebih merupakan penegasan terhadap eksistensi agama Islam di wilayah Nusantara sejak awal kedatangannya dengan aneka interpretasi dan ekspresi yang khas. Secara geografis, dapat dikatakan bahwa eksistensi Islam Nusantara merupakan Islam yang sangat khas Nusantara, serupa dengan adanya Islam Arab, Islam Afrika dan Islam Barat. Dari segi istilah, Islam Nusantara telah lama digunakan oleh para cendekiawan muslim Indonesia. Jauh sebelum Gus Dur, Sunan Giri menyebutnya dengan "*Din Arab Jawi*", yakni Agama Islam dari Arab dengan karakter Jawi atau Jawa. Bahkan Sunan Giri telah mencetuskan ide untuk menegakkan Islam Jawa (*Kimuddin Arab Jawi*). Selain itu, istilah Islam Nusantara dikampanyekan oleh pihak organisasi Nahdlatul Ulama (NU), setelah Said

Aqil Surodj (Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) dalam acara Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Masjid Istiqlal pada 14 Juni 2015 menyatakan bahwa Islam Nusantara hadir sebagai strategi untuk memperkuat nasionalisme Indonesia dan memperkuat persatuan bangsa dalam kerangka keberagaman, serta menjadi cara untuk menghadapi tantangan radikalisme dengan pendekatan damai dan dialogis (Rafii'i, 2019: 5-6).

Gagasan Islam Nusantara memiliki relasi yang erat dengan pandangan Gus Dur pada tahun 1980-an tentang pribumisasi Islam. Konsep ini dilontarkan Gus Dur pada kalangan *Nahdliyyin* (kelompok atau komunitas penganut NU) untuk menentukan sebuah distingsi baru bagi umat Islam Indonesia (Rumadi, 2022: 276). Konsep ini menolak gagasan bahwa Islam harus seragam dan kaku, melainkan melihatnya sebagai ajaran yang fleksibel dan mampu beradaptasi dan berinteraksi secara harmonis dengan konteks sosial, budaya dan sejarah Nusantara. Konsep ini menjadi fondasi gagasan Islam Nusantara yang menangkai radikalisme dan menempatkan Islam dalam konteks sosial budaya Indonesia, dengan mengedepankan nilai pluralisme, toleransi, dan damai dalam kerangka kebangsaan Indonesia.

### **PROFIL K. H ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR)**

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) lahir di Jombang, Jawa Timur pada 7 September 1940 atau 4 Sya'ban 1359 Hijriyah (Barton, 2016: 25). Gus Dur merupakan putra pertama dari enam bersaudara dan cucu dari K.H Hasyim Asy'ari (seorang tokoh pendiri Nahdlatul Ulama). Ayahnya bernama K.H A Wahid Hasyim, pernah menjabat sebagai ketua pengurus Nahdlatul Ulama ke-5 dan sebagai menteri agama pada masa pemerintahan presiden Soekarno. Ibunya bernama Hj. Sholehah, merupakan putri dari K.H Bisri Syamsuri (seorang tokoh besar Nahdlatul Ulama), pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang dan Rais Am Syuriah PBNU (Junaidi, 2000: 4). Pada waktu lahir, Gus Dur diberi nama Abdurrahman Addakhil. Addakhil berarti "Sang Penakluk". Akan tetapi, karena nama Addakhil ini tidak cukup dikenal di Indonesia, maka digantilah kata itu dengan "Wahid", untuk kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus Dur menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai empat putri: Alissa Qotrunnada, Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenni Wahid), Anita Hayatunnufus, dan Inayah Wulandari (Mirza, 2010:1).

Gus Dur terlibat dalam pengalaman politik pertamanya ketika ikut berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yaitu sebuah partai Islam yang merupakan gabungan dari 4 partai Islam termasuk Nahdlatul Ulama dalam Pemilu Legislatif 1982 (Nurdyansa, 2025). Pada tanggal 20 Oktober 1999, Gus Dur terpilih menjadi Presiden Indonesia ke-4 menggantikan B.J Habibie setelah dipilih MPR hasil Pemilu 1999. Pada tanggal 30 Desember 2009, Gus Dur meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, akibat komplikasi penyakit yang dideritanya sejak lama (Nurdyansah, 2025). Gus Dur merupakan seorang tokoh fenomenal dalam realitas sosial, keagamaan, politik dan kemanusiaan, serta selalu berada di pihak kaum marginal. Gus Dur juga dikenal sebagai seorang ulama, cendekiawan, pemikir, dan pemimpin politik yang baik di Indonesia.

## GAGASAN GUS DUR TENTANG PRIBUMISASI ISLAM

### Rumusan Masalah dan Metode Pemikiran Gus Dur tentang Pribumisasi Islam

Cikal bakal lahirnya term Islam Nusantara bermula dari kegiatan *tabayyun* (proses klarifikasi dan verifikasi sebuah informasi untuk memastikan kebenaran sebelum mengambil sikap atau menyebarkan informasi tersebut) yang dilakukan Gus Dur di hadapan para kiai di Pondok Pesantren Dar al-Tauhid al-Islamy Arjawinangun Cirebon, pada tanggal 8-9 Maret 1989. Saat itu, Gus Dur menyajikan tema tentang konsep pribumisasi Islam. Kegelisahan Gus Dur berangkat dari persoalan hubungan antara dua term, yaitu: “Islam” dan “Indonesia”. Pertanyaan filosofis yang sangat menggugah pemikiran Gus Dur ketika itu adalah: “Kita ini sebenarnya orang Islam yang hidup di Indonesia atau orang Indonesia yang beragama Islam?” (Wahid, 2007: ix-xiv).

Sepintas, pertanyaan di atas memiliki makna yang sama, namun setelah dicermati dan dipahami secara saksama akan terlihat jelas perbedaannya. Ungkapan “orang Islam yang hidup di Indonesia” mengandung pengertian bahwa agama Islam merupakan agama yang lahir di Arab Saudi, sehingga agama Islam akan bercorak kearaban. Dalam tataran ini, umat Islam akan menganggap bahwa semua budaya Arab itu bernafaskan Islam. Sedangkan ungkapan “orang Indonesia yang beragama Islam” mengandung makna bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang berada di wilayah Asia Tenggara, dan letaknya jauh dari Arab Saudi. Indonesia memiliki banyak perbedaan budaya, karakter, dan tradisi dengan Arab Saudi. Dengan demikian, umat Islam yang tinggal di Indonesia telah memiliki kebudayaan dan tradisi lokal sendiri. Mereka tetap melakukan tradisi-tradisi lokal tanpa menghilangkan esensi dan tujuan dari ajaran Islam tersebut. Hal inilah yang menjadi cikal-bakal konsep Islam pribumi dan kemudian berkembang menjadi Islam Nusantara. Pemikiran ini dipegang kuat oleh orang-orang yang mengusung paradigma tradisionalisme.

Gus Dur mengkonstruksikan konsep Islam Nusantara melalui dua pendekatan berikut. *Pertama*, membuat dialog antara *fiqih* (hukum-hukum syariat) dan adat. *Kedua*, mengembangkan aplikasi *nash* (ketetapan mutlak yang harus ditaati seorang muslim) atau penafsiran ulang *nash*. Dalam upaya mendialogkan *fiqih* dengan adat, Gus Dur menggunakan dialektika teks keagamaan atau ajaran Islam dengan realitas masyarakat yang sudah memiliki perspektif tersendiri dalam menghadapi pelbagai kenyataan hidup. *Fiqih* memang sangat berhubungan erat dengan kehidupan kaum muslim. Bahkan Islam pun hadir membawa hukum yang berhubungan dengan relasi manusia dengan Tuhan dan relasi manusia dengan sesama yang digali dari *Al-Qur'an* dan *Hadis* (narasi tentang perbuatan, ucapan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai sumber hukum dan rujukan praktis dalam Islam). Menurut Gus Dur, wahyu haruslah dipahami melalui lokalitas dan temporalitas yang memuat sejarahnya sendiri (Rafi'i, 2019: 65). Dengan demikian, faktor kontekstual harus dipertimbangkan.

Dalam upaya menafsirkan ulang *nash*, Gus Dur berkeyakinan bahwa *Al-Qur'an* dan *Hadis* tidak mungkin hadir tanpa adanya dialog dengan kondisi lokal, baik aspek historis maupun aspek sosial. Hal inilah yang memungkinkan umat Islam memahami secara jelas dan utuh, mana hal-hal prinsipil atau universal dan mana yang partikular, yang menjawab persoalan tertentu. Dalam perspektif Gus Dur, *Al-Qur'an* sebagai

sumber utama pemikiran umat Islam sebenarnya bersifat lokal. Hal ini didasarkan pada pemahamannya atas *Al-Qur'an* yang secara eksplisit telah menggambarkan aspek-aspek lokalitas dalam menyampaikan nilai-nilai universal yang dibawa oleh Islam. Begitu pun *Hadis* nabi, dengan berbahasa Arab yang dipenuhi ungkapan khas milik jazirah Arabia, bukan bahasa Arab yang dipahami oleh kawasan lain. Sebagai contoh, dalam *Al-Qur'an*, surga digambarkan dengan melihat aspek sosio-geografis Arab, yakni madu dan susu yang mengalir seolah-olah seperti sungai, serta buah-buahan yang lezat. Di sini, Gus Dur sangat jeli memperhatikan konteks sosial-historis terhadap teks yang diwahyukan kepada nabi (Rafi'i, 2019: 74-75).

### **Pribumisasi Islam sebagai Sebuah Konsep**

Islam Nusantara dapat dipahami sebagai sebuah corak keagamaan yang terbentuk dengan kekhasan budaya Nusantara. Sejak tahun 1989, Gus Dur sudah mendiskusikan pribumisasi Islam sebagai sebuah kesadaran banyak orang bahwa Islam Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan Islam yang ada di belahan dunia lain. Antara Islam dan budaya atau tradisi lokal Nusantara terjalin hubungan tarik menarik, saling membutuhkan, saling melengkapi, saling mengisi, bahkan saling belajar sebagai proses dalam pembentukan kultur Islam (Hasbiyallah dkk, 2016). Adanya kesesuaian tersebut memunculkan suatu pra-asumsi dasar sebagai pijakan dalam perwujudan kultural Islam, dengan pendekatan yang disebut Gus Dur sebagai pribumisasi Islam.

Melalui gagasannya tentang pribumisasi Islam, Gus Dur memberikan kritikan terhadap arus atau gejala Arabisasi. Menurut Gus Dur, "kita ambil nilai Islam, kita saring budaya Arab-nya" (Munfaridah, 2017: 22). Pandangan Gus Dur ini merupakan inti dari konsep akulturasi budaya dalam dakwah Islam. Pandangan di atas bukan berarti menolak atau menyingkirkan budaya Arab, melainkan sebuah sikap kritis terhadap formalisme religius dan praktik-praktik yang tidak relevan dengan konteks Indonesia. Pribumisasi memungkinkan Islam untuk tetap otentik secara teologis sambil mengakomodasi dan merehabilitasi martabat budaya lokal sebagai bagian integral dari ekspresi keagamaan. Gus Dur mencontohkan bahwa Masjid beratap genteng yang sarat dengan simbolisasi lokalnya sendiri di negeri kita, dituntut untuk dikubahkan. Budaya Wali Songo yang memiliki karakter Jawa, *saudati* (nyanyian dan tarian tradisional) Aceh, didesak ke pinggiran oleh *qasidah* (nyanyian) berbahasa Arab. Bahkan *udeng* (ikat kepala khas Jawa) harus mengalah pada sorban merah putih model Yasser Arafat (Wahid, 2000: 90).

Konsep pribumisasi Islam mencoba mengejawantahkan ajaran-ajaran Islam agar tidak bertentangan dengan kebudayaan lokal. Perpaduan antara keduanya menjadi saling melengkapi, yang mana agama lahir dari perintah Tuhan, sedangkan budaya merupakan hasil dari kreasi manusia. Dengan konsep ini maka menjadi seorang Muslim tidak harus mengikuti tradisi dan budaya Arab dan juga tidak harus meninggalkan tradisi dan budaya lokal khas Nusantara. Justru, seorang Muslim harus memunculkan ciri khas dari tradisi dan budaya di mana ia tinggal, sehingga akan memunculkan istilah-istilah lokal seperti Islam India, Islam Indonesia, Islam Ghana, Islam Amerika, Islam Spanyol, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa Arabisasi atau proses memaksakan diri pada tradisi Timur Tengah akan mencabut masyarakat dari budaya lokalnya sendiri.



Dalam idenya tentang pribumisasi Islam, Gus Dur berpendapat bahwa, yang dipribumikan adalah manifestasi kehidupan Islam belaka, bukan ajaran yang menyangkut inti keimanan dan peribadatan formalnya. Gus Dur juga menekankan bahwa tidak diperlukan Al-'Qur'an Batak dan *Hadis* Jawa. Islam tetap Islam, di mana saja agama itu ditemukan. Hal ini tidak berarti bahwa semua harus disamakan "bentuk luarnya" (Wahid, 1999: 108). Penegasan Gus Dur ini sebenarnya ingin mengungkapkan bahwa permasalahan bentuk haruslah diberi peran oleh kebudayaan lokal, bukan mentransfer dari kebudayaan luar. Oleh karena itu, pemupukan kembali akar budaya lokal dalam perkembangan umat Islam di Indonesia harus menjadi sebuah tuntutan.

Gus Dur (2001: 119-123) juga memberikan "batasan negatif" tentang "apa yang tidak boleh terjadi" dalam pribumisasi Islam. *Pertama*, tidak boleh terjadi pembauran Islam dengan budaya, sebab berbaur berarti hilangnya sifat-sifat asli. Islam harus tetap pada sifat Islamnya. *Al-Qur'an* harus tetap dalam bahasa Arab terutama dalam *shalat* (ibadah wajib), sebab hal ini telah menjadi norma. *Kedua*, penyesuaian ajaran Islam dengan kenyataan hidup hanya diperkenankan sepanjang menyangkut sisi budaya. Dalam soal wali nikah misalnya, ayah angkat tetap bukan wali nikah untuk anak angkatnya. Ketentuan ini adalah norma agama, bukan kebiasaan. *Ketiga*, karena adanya prinsip-prinsip yang keras dalam hukum Islam, maka adat tidak bisa mengubah *nash* melainkan hanya mengubah atau mengembangkan aplikasinya saja, dan memang aplikasi tersebut akan berubah dengan sendirinya. Misalnya, Nabi tidak pernah menetapkan beras sebagai benda zakat, melainkan gandum. Lalu ulama yang mendefinisikan gandum sebagai *qutul balad* (makanan pokok). Dan karena definisi itulah, gandum berubah menjadi beras untuk konteks Indonesia.

Berdasarkan pemahaman yang baru saja diuraikan ini, filosofi pribumisasi Islam dalam konteks pemikiran Gus Dur lebih merupakan sebuah upaya untuk mengindigenisasi Islam dalam konteks sosial budaya dan realitas Indonesia. Hal ini mengandung pengertian bahwa Islam dan tradisi lokal tidak mengalami reduksi satu terhadap yang lain. Islam tetap pada kekhasannya yang kokoh, budaya juga tetap pada karakternya yang unik, sehingga keduanya tidak bersifat superioritatif. Dengan tetap mengakomodasi budaya lokal, seseorang tetap bisa menjadi Muslim seratus persen dengan tetap menjalani tradisi dan budaya lokal yang menjadi basis kultural kehidupan masyarakat Nusantara. Dengan demikian, Islam tidak dipandang sebagai agama asing atau eksklusif, melainkan sebagai bagian integral dari kebudayaan pribumi Indonesia. Pada titik ini, Gus Dur menekankan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, yang toleran dan inklusif terhadap keberagaman agama dan budaya di Indonesia. Filosofi ini dapat menjadi respons terhadap realitas sosial politik kontemporer di Indonesia yang acapkali diwarnai oleh intoleransi agama dan politik identitas yang dapat memecah belah masyarakat.

## **PRO-KONTRA TERHADAP PRIBUMISASI ISLAM (ISLAM NUSANTARA)**

Penerapan filosofi Islam Nusantara Gus Dur terkait pribumisasi Islam tidak lepas dari kontroversi. Bahkan Islam Nusantara yang dijadikan tema utama Mukhtamar NU tahun 2015 di Jombang telah menimbulkan debat publik yang serius (Sahal dkk, 2015: 16). Sikap pro dan kontra muncul, baik dari ulama maupun petinggi politik di Indonesia (Munfaridah, 2017). Beberapa kelompok, terutama yang berpandangan

puritan, menganggapnya sebagai istilah yang memecah-belah umat dan menciptakan gagasan bahwa Islam di Indonesia berbeda dari Islam di Timur Tengah.

Kelompok radikal bahkan mengklaimnya sebagai Islam yang menyimpang. Jika ada Islam lain di luar Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka harus segera beradaptasi dengan Islam standar tersebut. Dengan demikian, keunikan identitas Islam di wilayah tertentu justru dipandang negatif karena telah melakukan penyelewengan dari format Islam yang ideal (Islam yang sebenarnya). Atas dasar inilah, Islam Nusantara yang menjadi keunikan Islam Indonesia sedang menghadapi gugatan dari kelompok ini (Rahmat dkk., 2003: xvi). Padahal, pada mulanya Islam mengakomodasi eksistensi budaya Arab dan menjadikannya sebagai media pewartaan.

Pada bagian lain, terdapat ide-ide menarik dari pemikir-pemikir Islam tertentu yang menyetujui adanya Islam Nusantara. Dengan mendasarkan pandangannya pada Muhammad, Qatadah menyatakan *al-din wahid wa al-syari'ah mukhtalifah*/agama hanya satu, sedangkan syariat berbeda-beda (Sahal & Aziz, 2015: 98). Selain itu, Ali (2006: 10) mendeskripsikan bahwa Islam itu satu. Akan tetapi, ketika Islam telah membumi, ekspresi dan pemahaman umatnya akan sangat beragam. Sobarna (2008: v) juga mengungkapkan bahwa pada dasarnya Islam itu satu, tetapi dalam mengkajinya, ada dua wajah yang biasanya dikemukakan dengan aneka ekspresi. Ma'arif (2009: 181) membahasakannya dengan ungkapan yang sangat puitis, "sebuah Islam, seribu satu ekspresi." Menurut Ali Sodiqin (2013:7), dalam implementasi ajaran Islam, dibutuhkan media (konteks kebudayaan lokal) untuk mentransformasikan nilai-nilai universalnya ke dalam praksis kehidupan. Hal ini berarti bahwa secara historis, Islam tidak serta-merta menolak eksistensi budaya seperti yang selama ini diyakini oleh kelompok-kelompok radikal. Anggapan kaum radikal bahwa budaya dan tradisi adalah bidah harus ditelaah kembali.

Pribumisasi Islam di Indonesia sama sekali tidak bernuansa rasial, menolak atau tidak menghormati budaya dan etnik asing. Dalam pandangan Umar (2019), menjadi seorang Muslim tidak mesti menjadi seorang Arab, Iran, Mesir, Pakistan, dan Negara asal mazhab yang dianut. Kita tetap menjadi orang Indonesia, bahkan sebagai orang Jawa, Bugis, Melayu, Batak, Banjar dan lainnya. Hal ini mengandung pengertian bahwa usaha pribumisasi ajaran Islam di Indonesia tetap dianggap sebagai *ongoing process*. Benturan nilai pasti akan muncul jika ajaran Islam gagal untuk dipribumikan.

Kehadiran Islam di Nusantara dan menyatunya Islam dengan budaya lokal telah menciptakan prinsip bahwa budaya dan kearifan lokal dapat disintesis dan disinergikan dengan *Syari'at* Islam. Alasannya adalah bahwa substansi ajaran Islam tidak berbeda jauh dengan ajaran moral agama-agama atau kepercayaan masyarakat lokal di wilayah Nusantara. Dengan demikian, Islam Nusantara merupakan Islam yang sangat jenius Indonesia (Rudi, 2019: 145). Islam yang ramah terhadap budaya dan berkembang di wilayah Indonesia yang bersemboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Islam yang menyajikan atmosfer kesejukan dan kedamaian bagi setiap siapa saja yang tinggal di Indonesia.

Dengan menawarkan model Islam yang berakar kuat pada tradisi dan akulturasi, Gus Dur menyediakan alternatif narasi terhadap ideologi puritan yang cenderung kaku dan eksklusif. Islam Nusantara menunjukkan bahwa keragaman adalah



kekayaan, bukan ancaman. Pemahaman agama yang mendalam dan kontekstual dapat melahirkan sikap yang toleran dan damai. Islam Nusantara mampu mempertahankan eksistensinya dan menampilkan wajahnya yang teduh, toleran serta penuh kedamaian di Indonesia, bahkan di dunia.

Meskipun selalu ada perdebatan ide yang terus-menerus terkait Islam Nusantara, ide Gus Dur tentang pribumisasi Islam tetap relevan, terutama berhadapan dengan tantangan kontemporer. Para pemikir Islam yang mendukung adanya identitas Islam Nusantara tampaknya setuju bahwa substansi Islam memang satu, namun ekspresinya sangat beragam, tergantung pada konteks kehidupan masyarakat setempat dengan budayanya yang khas. Pada tataran ini, eksistensi identitas Islam Nusantara hanya ditinjau dari sudut pandang ekspresinya. Ekspresi inilah yang dapat diidentifikasi, diketahui dan dipahami sehingga memudahkan orang untuk memahami Islam Nusantara tersebut.

### **FILOSOFI PRIBUMISASI ISLAM SEBAGAI RESPONS TERHADAP REALITAS SOSIAL POLITIK KONTEMPORER DI INDONESIA**

Pada dasarnya, Islam di Indonesia berbeda dengan Islam di Timur Tengah atau negara lain terutama karena integrasi unsur-unsur budaya lokal dan pengaruh sejarahnya. Di negara-negara Timur Tengah atau negara-negara lain, Islam seringkali dipraktikkan dengan fokus pada ketelitian tekstual dan kemurnian doktrinal. Islam Indonesia dikenal karena karakteristiknya yang moderat, toleran, dan sinkretis, memadukan ajaran Islam dengan adat istiadat, dan norma sosial setempat (Menchink, 2016: 158). Dengan demikian, filosofi Gus Dur tentang Islam Nusantara yang tereksplisit dalam konsep pribumisasi Islam merupakan sebuah gagasan yang patut diberi apresiasi. Gus Dur melihat bahwa Islam harus berakar pada nilai-nilai lokal yang sudah ada dalam keragaman budaya Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila serta pluralisme. Gus Dur menggunakan pendekatan sosial-kultural, politik-kultural, dan pedagogis dalam mengimplementasikan pribumisasi Islam, agar Islam bisa hidup berdampingan dengan agama lain secara damai dan demokratis (Barid, 2025: 22). Dalam konteks pemahaman inilah, pribumisasi Islam dalam perspektif Gus Dur dapat bertujuan untuk menahan sekaligus mengatasi potensi konflik yang acap kali muncul dari politik identitas dan intoleransi agama, dengan menanamkan penghormatan kepada hak-hak kaum minoritas, dan memperkuat semangat kebangsaan yang inklusif.

Dalam kaitannya dengan intoleransi agama dan politik identitas yang acapkali terjadi di Indonesia, Gus Dur menegaskan bahwa agama tidak boleh menjadi alat politik yang memecah belah masyarakat. Ia menekankan Islam sebagai etika sosial yang menegakkan keadilan, hak minoritas, serta penghormatan antarumat beragama (Ihsani et al, 2021: 107). Melalui konsep pribumisasi Islam, Gus Dur mengajak umat Islam dan masyarakat luas untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi dan pluralisme sebagai wujud nyata dari keislaman yang sesuai dengan kondisi kemajemukan di negara Indonesia. Gus Dur yakin bahwa Islam yang sudah dipribumikan harus mampu berdialog dan hidup harmonis dalam keberagaman masyarakat Indonesia.

Gagasan pribumisasi Islam yang dikembangkan oleh Gus Dur dapat diaplikasikan dalam kehidupan sosial politik kontemporer Indonesia dengan memberikan penekanan pada Islam yang sesuai dengan budaya lokal dan nilai kebangsaan. Aplikasinya meliputi pemupukan toleransi, penghargaan terhadap pluralitas, dan penolakan terhadap penggunaan agama sebagai alat politik identitas yang membawa perpecahan. Dalam konteks intoleransi agama dan politik identitas yang semakin mengemuka, pribumisasi Islam menjadi pengarah agar umat Islam dan sekaligus elit politik menempatkan nilai agama dalam rangka nilai kemanusiaan dan persatuan bangsa.

Implikasinya adalah terciptanya ruang dialog antaragama yang konstruktif dan pendidikan keagamaan yang mengutamakan akhlak toleran dan sikap inklusif, sehingga meredam fanatisme sempit dan radikalisme yang memicu intoleransi. Dalam ranah politik, konsep pribumisasi Islam menolak politisasi agama yang bersifat eksklusif dan mengarah pada diskriminasi atau marginalisasi kelompok lain. Pendekatan inilah yang justru mendukung penguatan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ideologi bersama yang memayungi keberagaman sosial dan agama. Dengan demikian, pribumisasi Islam berkontribusi pada stabilitas sosial politik, dan memperkuat demokrasi inklusif di Indonesia, di tengah ancaman intoleransi dan politik identitas yang bisa memecah-belah masyarakat.

## PENUTUP

Pribumisasi Islam dalam perspektif Gus Dur lebih merupakan sebuah model pemikiran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Islam yang dikemas melalui budaya maupun tradisi-tradisi lokal khas Nusantara atau Indonesia. Kerangka kerja yang dibangun Gus Dur melalui pribumisasi Islam menantang narasi puritan dan radikal dengan menyediakan model keislaman yang akomodatif terhadap budaya, toleran terhadap perbedaan, dan berorientasi pada kemanusiaan. Gus Dur menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang kaku atau menolak kemajuan, melainkan sebuah kekuatan yang dapat membawa kedamaian dan keadilan bagi semua (*rahmatan lil 'alamin*). Dengan demikian, filosofi pribumisasi Islam dalam perspektif Gus Dur ini merupakan narasi tandingan yang begitu kuat terhadap stigma negatif terhadap Islam yang sangat kompleks, sekaligus menawarkan solusi yang komprehensif, multifaset, dan praktis sebagai respon terhadap situasi sosial politik kontemporer di Indonesia.

Berdasarkan analisis yang mendalam, ada tiga rekomendasi yang dapat diajukan untuk melanjutkan dan memperkuat filosofi pribumisasi Islam di Indonesia. Pertama, literasi digital dan konten positif. Hal ini bertujuan mendorong komunitas Muslim untuk menghasilkan konten yang menunjukkan wajah Islam yang toleran, serta meningkatkan literasi digital untuk memerangi penyebaran stereotip dan propaganda. Regulator juga perlu mengawasi dan mengatur penggunaan media sosial dan ruang digital agar tidak menjadi sarana penyebaran ujaran kebencian atau radikalisme, sambil mendorong konten moderasi beragama yang berlandaskan pribumisasi Islam.

Kedua, pemerintah perlu menguatkan pendidikan agama yang moderat, yang menanamkan nilai toleransi, pluralisme, dan penghormatan terhadap hak semua

orang sejak dini di setiap jenjang pendidikan pada setiap sekolah di Indonesia. Kebijakan ini harus mengintegrasikan kurikulum yang mempromosikan dialog antaragama dan pemahaman kemajemukan budaya agar menjadi fondasi yang kuat bagi kehidupan masyarakat yang harmonis. Dialog antaragama yang berkelanjutan dapat memupuk sikap dan tindakan saling menghargai, dan memperkuat ikatan kebersamaan di tengah keberagaman.

Ketiga, dalam hubungan dengan kebijakan publik, pemerintah harus menegakkan hukum secara adil terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi, serta mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam memantau dan melaporkan potensi konflik berbasis agama. Langkah ini dapat menekan munculnya politik identitas yang eksklusif dan menangkal intoleransi di Indonesia.

Dengan menerapkan ketiga rekomendasi di atas, konsep pribumisasi Islam yang digagaskan Gus Dur bisa menjadi solusi efektif demi tercapainya harmoni kehidupan dalam masyarakat Indonesia yang plural. Selain itu, Indonesia dapat terus menjadi contoh global tentang bagaimana Islam dapat menjadi kekuatan untuk memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan martabat kemanusiaan di dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fathoni. (2018). Islam Nusantara Menurut Gus Dur: Kajian pribumisasi Islam. *Mozaic Islam Nusantara*, 4(1), 21-40. Retrieved from <https://journal.unusia.ac.id/index.php/mozaic/article/view/120>
- Ahmad. (2021). *Biografi Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid) dan Pemikirannya*. Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/best-seller/biografi-gus-dur/>, accessed on 7 July 2025.
- Ali, M. (2006). *Islam Muda: Liberal, Post-Puritan, Post-Tradisional*. Yogyakarta: Apeiron Philotes.
- Alif, J., & Nur, A. (2019). Islam Nusantara: Solusi Menyikapi Problem Radikalisme Agama. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 19(1), 55-76. Retrieved from <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/3374>
- Azyumardi, A. (2004). *Shari'at Islam Dalam Bingkai Nation State*. Jakarta: Paramadina.
- Barton, G. (2016). *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: Saufa & LKiS.
- Geertz, C. (2009). *The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural-Broker*. Cambridge: University Press.
- Hasbiyallah, Burhanudin, U., Sulhan, M., & Khoiruddin, H. (2016). *Deradikalisasi Islam Indonesia: Studi Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati.
- Ihsani, A., Ammiruddin, F., Febriyanti, N., & Syakuuroo, A. (2021). Gus Dur's Multicultural Da'wah and It's Relevance to Modern Society. *El. Harakah*, 23(1),

- 103-122. Retrieved from <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/11642>
- Junaidi, D. (2000). *Beyond the Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maarif, & Ahmad, S. (2009). *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Mizan & Maarif Institute.
- Menchik, J. (2016). *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. New York: Cambridge University Press.
- Muhammad M. (2010). *Gus Dur Sang Penakluk: Sebuah Biografi Singkat*. Jombang: Pustaka Warisan Islam.
- Munfaridah, T. (2017). Islam Nusantara sebagai Manifestasi Nahdlatul Ulama. (NU) dalam Mewujudkan Perdamaian. *Wahana Akademika*, 4(1), 19-34. Retrieved from <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/1476>
- Musliq, & Adnan K. (2014). *Nilai Universal Agama-Agama di Indonesia, Menuju Indonesia Damai*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Nurdyansah. (2025). Biografi KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Presiden Indonesia Keempat. <https://www.biografiku.com/biografi-kyai-haji-abdurrahman-wahid-gus-dur>, accessed on 4 September 2025.
- Qomar, M. (2015). Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, dan Pengamalan Islam. *El Harakah* 17 (2), 198-217. Retrieved from <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/3345/0>
- Rafii, M. (2019). *Islam Nusantara Perspektif Abdurrahman Wahid: Pemikiran dan Epistemologinya*. Malang: Literasi Nusantara.
- Rahabeat, R. (2019). *Membaca (Kembali) Islam Nusantara: Perspektif Seorang Kristiani*. dalam *Mozaik Moderasi Beragama Dalam Perspektif Kristen*. Cetakan I; Jakarta: BPK Gunung Mulia & Dirjen Bimas Kristen.
- Rahmat, M. (2003). *Islam Pribumi Mendialogkan Agama Membaca Realitas*. Jakarta: Erlangga.
- Rumadi, A. (2022). *Islam Nusantara: Hadiah Indonesia untuk Dunia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sahal, A. (2015). *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*. Bandung: Mizan.
- Sobarna, A. (2008). *Islam Positif Spirit Wacana Solusi Refleksi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Solidikin, Ali. (2013). Sejarah Harmonisasi Islam Dan Kebudayaan: Dari Inkulturasi Hingga Akulturasi. *Mazhabuna: Media Transformasi Pemikiran Islam*, 1(7). pp. 1-15.
- Umar, N. (2019). *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Wahid A. (2001). *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*. Depok: Desantara.
- Wahid, A. (1999). *Tuhan Tidak Perlu Dibela*. Yogyakarta: LKiS.

Wahid, A. (2007). *Menggerakkan Tradisi, Esai-esai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.

Wajdi, Muh Barid Nizarudin. (2025). The Thought of Gus Dur: An Evaluation of Religious Policies in Indonesia Through The Lens of Pluralism and Multiculturalism. *Journal of Religious Policy*, 4(1), 22-44. Retrieved from <https://Doi.Org/10.31330/Repo.V4i1.52>.